

 BANDUNG (Mal.COM) Perhelatan Pilkada serentak mendapat perhatian serius dari para Aktivis lingkungan hidup, khususnya dari Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jabar (Walhi Jabar). Walhi Jabar berpesan agar masyarakat memilih kandidat paslon pada Pilkada kali ini secara cermat dengan memperhatikan keberpihakannya pada pelestarian lingkungan hidup.

Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, mengatakan permasalahan tata ruang dan lingkungan hidup di delapan daerah di Jawa Barat yang menggelar Pilkada Serentak, menjadi masalah penting dan krusial dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Contohnya, sebut Dadan, ada empat daerah yang dihadapkan pada krisis buruknya kualitas DAS Citarum seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Karawang dan Indramayu.

"Mulai dari masalah alihfungsi lahan, pencemaran limbah dan sampah serta krisis pengambilan air bawah tanah, bencana longsor, banjir dan kekeringan di musim kemarau," ungkap Dadan dalam rilisnya, Jumat (27/11/15). Khususnya Kota Depok, yang dihadapkan pada masalah alihfungsi lahan dan kurangnya ruang terbuka hijau dan juga banjir di musim penghujan.

Kabupaten yang memiliki pesisir dan pantai serta hutan seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran juga dihadapkan pada masalah pertambangan baik di kawasan hutan dan pesisir.

"Kabupaten Indramayu yang berada di Kawasan Panturan Jawa Barat yang paling krusial masalah alih fungsi lahan pertanian, abrasi, reklamasi pantai dan sampah," sebut Dadan. Kemudian ia menambahkan, sebagai pemilih dan sekaligus pemberi mandat, warga harus memilih dengan cerdas, tidak terjebak pada politik uang dan pencitraan para kandidat.

"Apalagi para calon incumbent yang ternyata pada lima tahun sebelumnya gagal membawa perubahan bagi kehidupan warga dan termasuk lingkungan hidup. Jangan lagi mudah dibodohi dengan uang dan janji-janji manis yang para kandidat," seru Dadan.

Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar Adang Kusnadi, menambahkan, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih yaitu komitmen dan visi, kapasitas dan integritas yang bisa membawa perubahan bagi perbaikan kualitas kehidupan warga, ruang dan lingkungan hidup.

Dari aspek komitmen, sebut Adang, bupati/walikota harus memiliki komitmen dan visi yang jelas dan terang soal lingkungan hidup. Harus memiliki agenda yang terukur untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

"Indikator yang nyata adalah agenda pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup, dan mengalokasikan minimal 5% dari total APBD masing-masing daerah," terangnya.

Sedangkan dari sisi kapasitas, kandidat yang dipilih harus memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus rakyat, pengalaman dalam memimpin dan kapasitas dalam memperbaiki dan mengelola lingkungan hidup, dan kapasitas untuk melayani warganya.

Dari aspek integritas, sambung dia, kandidat yang dipilih bukanlah kandidat yang korup, dekat dengan pemodal dan bukan bagian dari mafia sumber daya alam dan perizinan.

"Melihat para kandidat yang ada yang didominasi oleh para Petahana, kami melihat bahwa kandidat incumbent telah gagal mengurus ruang dan lingkungan hidup apalagi menjamin kesejahteraan warga," paparnya.

"Oleh karena itu ke depan, warga dan daerah membutuhkan sosok bupati/walikota yang mau melayani rakyat, mau mengurus ruang, mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, tidak korup, tegakan aturan, bukan bagian dari mafia proyek perizinan ruang dan sumberdaya alam, apalagi mafia proyek APBD," tegas Adang. (RED)